

Perempuan Gerwani Minangkabau dalam Belitan Konflik G30S/PKI 1965

Serli Agustina^{1(*)}, Siti Fatimah²

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*serliagustina171@gmail.com

Abstract

This article is a historical study that discusses the fate of the Gerwani Minangkabau woman in the conflict wrought by the G30S/PKI 1965. The pupose of this study is to describe the life experiences and the fate of the Minangkabau members of the Gerwani who became entangled in the conflict of their involvement in the illegal organization. This research uses the historical methods based on the four steps of activity of heuristic, source criticism, interpretation and historiography. The conclusion obtained is that this study expounded facts related to the events of the G30S in 1965 that occurred in the land of Minang (west Sumatera). The participation of Minangkabau women in the Gerwani membership dragged them into a conflict that occurred during the events of the G30S 1965. Their desire to fight for women comes to their misery. Discrimination and negative stigma have not stopped them from feeling.

Keyword : *Gerwani, Minangkabau, PKI, G30S 1965, Political Prisoner*

Abstrak

Artikel ini merupakan kajian sejarah yang membahas mengenai nasib perempuan-perempuan Gerwani Minangkabau dalam belitan konflik G30S/PKI 1965. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengalaman hidup dan nasib para perempuan-perempuan Minangkabau anggota Gerwani yang terbelit konflik akibat keterlibatannya dalam organisasi terlarang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang bertumpu pada empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kesimpulan yang diperoleh adalah penelitian ini memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa G30S 1965 khususnya yang terjadi di ranah Minang (Sumatera Barat). Keikutsertaan perempuan Minangkabau dalam keanggotaan Gerwani ikut menyeret mereka kedalam konflik yang terjadi dalam peristiwa G30S 1965. Keinginan mereka memperjuangkan kaum perempuan bermuara pada penderitaan yang mereka dapatkan. Diskriminasi dan stigma negatif hingga kini tak henti mereka rasakan.

Kata Kunci : Gerwani, Minangkabau, PKI, G30S 1965, Tahanan Politik

Pendahuluan

Perempuan dalam pengakuan strata adat Minangkabau memiliki kedudukan yang tinggi. Sebutan sebagai *Bundo Kanduang* melambangkan sebagai sosok perempuan cerdas, arif dan bijaksana. Perempuan Minangkabau memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan. Peran perempuan di Minangkabau tidak hanya dalam hal mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian masyarakat yang berkontribusi terhadap kemajuan nagari (Siti Fatimah, 2009.hlm 14). Hal ini lah salah satu faktor pendukung berkembangnya organisasi-organisasi perempuan di Sumatera Barat salah satunya adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Meskipun mempunyai kedudukan yang tinggi dalam adat, perempuan Minangkabau harus paham dengan posisinya sebagai perempuan yang harus patuh pada laki-laki sesuai

dengan ajaran Agama Islam. Pada sisi lain, perempuan Minangkabau juga merasa tersisihkan, beberapa fenomena dalam masyarakat membuat perempuan merasa sebagai korban, seperti poligami, kawin paksa, kawin dibawah umur, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung perempuan Minangkabau tertarik bergabung dalam Gerwani.

Kiprah perpolitikan Gerwani terus berkembang, dengan massa yang semakin banyak dan sudah mempunyai cabang di berbagai kota di Indonesia. Akan tetapi kejayaan itu akhirnya kandas pada tahun 1965 dengan ditandai meletusnya peristiwa G30S yang diduga Gerwani terlibat didalamnya. Histeria dan kemarahan masyarakat menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan PKI dan organisasi massanya. Tidak pandang apapun massa dengan leluasa berlaku semena-mena terhadap anggota PKI dan ‘keluarganya’. Mereka ditangkap bahkan ada yang langsung dibunuh ditempat tanpa tahu mereka bersalah atau tidak. Menurut data korban G30S 1965 di Sumatera Barat tercatat sekitar 2.277 orang dibunuh, dan 30.212 orang ditahan (sumber: YPKP 1965 Sumatera Barat).

Penderitaan berakhir pada tahun 1977, mereka dibebaskan dan dikembalikan ke masyarakat. Dibebaskan bukanlah akhir penderitaan, status baru sebagai eks-tapol menjadi tantangan baru bagi mereka, stigma negatif sebagai perempuan keji dan jahat mereka terima hingga hari ini.

Ada beberapa kajian mengenai Gerwani yang relevan dengan artikel ini seperti buku karangan Saskia Wieringa yang berjudul *kuntilanak wangi* yang diterjemahkan dari judul aslinya *The Perfumed Nightmare*. Dalam karyanya Saskia Wieringa memfokuskan pada masalah organisasi perempuan di Indonesia terutama Gerwani. Selanjutnya, buku yang berjudul perempuan berselimut konflik karya Reni Nuryanti yang didalamnya mengkaji tentang perempuan Minangkabau di masa Dewan Banteng dan PRRI. Dalam kajiannya tersebut lengkap menjelaskan tentang aktivitas Gerwani di Sumatera Barat. Kajian relevan lainnya adalah buku karya Amurwati Dwi Lestariningsih tentang kisah tapol Gerwani di kamp Plantungan yang menjelaskan kepahitan hidup yang dialami tapol perempuan yang diisolasi dan sarat dengan tindak kekerasan fisik maupun mental.

Penelitian ini sangat penting untuk pengembangan pengetahuan tentang sejarah lokal, khususnya tentang basis perkembangan organisasi Gerwani di Ranah Minang. Penulis tertarik mengkaji tentang topik ini karena sangat banyak peneliti temukan kisah-kisah pahit dan pengalaman-pengalaman penting dalam perjalanan hidup anggota Gerwani di Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Artikel ini termasuk penelitian sejarah dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengalaman hidup dan nasib para perempuan-perempuan Minangkabau anggota Gerwani yang terbelit konflik akibat keterlibatan dalam organisasi terlarang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang bertumpu pada empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pada tahap heuristik, penulis mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang penulis gunakan berupa data hasil wawancara dengan beberapa eks-Gerwani seperti Zulbainar (eks Gerwani Kab. Padang Pariaman), Nadiani.S (Ketua YPKP 1965 Sumatera Barat/ eks Gerwani Bukittinggi), Manismar (eks Gerwani Kab. Solok), Janiar (eks Gerwani Kab. Padang

Pariaman), serta beberapa narasumber lainnya seperti H. Alimunar (eks PKI), dan Inyiah Muih (eks PRRI). Selain itu, penulis juga memperoleh data jumlah korban peristiwa G30S di Sumatera Barat dan beberapa data lainnya. Sumber sekunder yang penulis gunakan berupa telaah kepustakaan yang berkenaan dengan kajian tentang Gerwani diantaranya buku karangan Reni Nurhayanti yang berjudul perempuan berselimut konflik, yang meneliti tentang perempuan Minangkabau di masa Dewan Benteng dan PRRI. Selain itu, buku karangan Amurwati Dwi Lestariningsih yang mengkaji tentang tapol wanita di kamp. Plantungan. Tahap kritik sumber, dalam kritik sumber peneliti membandingkan beberapa hasil wawancara yang telah di peroleh, misalnya membandingkan hasil wawancara para eks-Gerwani dengan mantan anggota PRRI. Tahap interpretasi, pada tahap ini penulis melakukan penafsiran dari sumber yang telah di kritik. Fakta-fakta tersebut disusun berdasarkan tahap klasifikasi masalah penelitian yang dituju. Pada tahapan ini penulis menghubungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, studi pustaka dan studi arsip. Tahap historiografi, fase akhir ini penulis melakukan penulisan sejarah ilmiah berdasarkan pada fakta-fakta yang telah disusun sesuai klasifikasi data dan kaidah-kaidah dalam penulisan sejarah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perempuan Minangkabau

Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Salah satu identitas suku Minangkabau adalah pada sistem kekerabatannya. Minangkabau menjadi suku terbesar di dunia yang memegang sistem kekerabatan matrilineal yang mana sampai saat ini sistem matrilineal sudah tidak lagi terdapat di dunia, terkecuali di Afrika Tengah dan Negara bagian Assam India (Nuryanti, 2011, hlm 21). Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu. Garis keturunan ini lah yang mengatur tentang penerusan pemberian suku kepada anaknya hingga urusan harta warisan (pusaka). Berbanding terbalik dengan sistem yang banyak dianut masyarakat di daerah lainnya yaitu patrilineal (garis keturunan ayah).

Perempuan Minangkabau dalam pengakuan strata adat Minangkabau memiliki kedudukan yang tinggi, sebutan sebagai *Bundo Kanduang* melambangkan sebagai sosok perempuan cerdas, arif dan bijaksana. Hal ini tercermin dalam pepatah adat seperti, "*Bundo limpapeh rumah nan gadang*" (ibu yang berfungsi sebagai penyanggah), *umbui parui pagangan kunci* (pemegang kunci harta kekayaan), *umbui dalam titah* (sumber segala titah), *sumarak dalam kampuang* (penyemarak dalam suatu kampung) dan *hiasan dalam nagari* (hiasan negeri). Ungkapan pepatah ini bermakna bahwa perempuan Minangkabau memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan. Peran perempuan di Minangkabau tidak hanya dalam hal mengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian masyarakat yang berkontribusi terhadap kemajuan nagari (Siti Fatimah, 2009.hlm 14).

Ditempatkan pada posisi yang tinggi dalam masyarakat bukan berarti perempuan Minangkabau dapat semena-mena di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada sisi lain perempuan Minangkabau juga tersisihkan, sebab mereka harus pandai dan mengerti dengan posisinya. Seperti pada hak suara di dalam keluarga dan urusan publik, dalam hal ini kedudukan perempuan tetap berada dibawah laki-laki. Mereka hanya diperbolehkan sebatas memberi saran, bukan keputusan. Sistem ini selaras dengan yang diajarkan oleh agama Islam.

2. Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) di Minangkabau

Gerwani merupakan organisasi perempuan terbesar dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Organisasi yang didirikan tahun 1950-an ini merupakan organisasi perempuan yang berorientasi pada penggalangan massa seluas-luasnya dan berjuang demi hak-hak perempuan dan anak-anak. Berkaitan dengan keanggotaannya, dinyatakan bahwa Gerwani terbuka untuk semua perempuan Indonesia yang berusia 16 tahun atau lebih (atau kurang jika sudah bersuami). Hingga Desember 1957, ketika Gerwani mengadakan kongres III, jumlah anggota Gerwani mencapai 663.740 orang. Suatu perkembangan yang luar biasa bagi suatu organisasi perempuan pada saat itu (Lestariningsih.A, 2011,35-47).

Perkembangan cabang-cabang Gerwani tidak terlepas dari upaya pengkaderan yang menjadi “urat nadi” organisasi ini. Di Minangkabau, Gerwani terus berkembang, meskipun dari segi gagasan ia banyak ditentang karena dianggap *underbouw* PKI. Pada masa-masa awalnya, pimpinan Gerwani di Sumatera Barat adalah Nur Suhud dan Dahliar, masing-masing dari Padang Panjang dan Payakumbuh. Adapun pusatnya adalah di Lambau, Bukittinggi.(Nuryanti,2011,hlm 69).

Perkembangan Gerwani sampai ke ranah Minang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan PKI di Sumatera Barat. Perkembangan Gerwani yang sangat pesat dalam upaya pengkaderan tidak terlepas dari pengaruh PKI yang semakin mengakar dalam tubuh Gerwani. Kedekatan Gerwani dan PKI tersebut dikarenakan kesamaan ide, visi, dan misi, bahkan karena kedekatannya Gerwani dianggap sebagai salah satu organisasi ‘keluarga’ PKI.

Gencarnya pengkaderan Gerwani di ranah Minang tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang membuat perempuan Minangkabau tertarik untuk bergabung dalam gerakan tersebut. Dalam kampanyenya Gerwani menarik simpati masyarakat dengan mengangkat permasalahan yang relevan dengan kondisi lingkungan setempat. Seperti permasalahan perkawinan, maraknya poligami, perkawinan paksa, hingga perkawinan dibawah umur. Bagi Gerwani hal tersebut sangat merugikan kaum perempuan. Permasalahan lainnya yaitu pada bidang pendidikan, perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah, sekolah diutamakan hanya untuk kaum laki-laki sehingga banyak perempuan yang buta huruf. Kemudian di bidang ekonomi dan pertanian, gerwani berkerja sama dengan BTI yang juga salah satu organisasi massa PKI ikut memperjuangkan petani dalam rangka reforma agraria dan peningkatan pertanian masyarakat. Dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ini lah yang membuat kaum perempuan Minangkabau tertarik untuk bergabung dengan Gerwani karena mereka merasa cocok dengan tujuan dan misi Gerwani tersebut.

Kader Gerwani terkenal sebagai ‘ibu militan’ yang menggambarkan sosok perempuan tangguh dan pejuang, tetapi tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dalam rumah tangganya. Seperti penuturan Nadiani (80) seorang eks-Gerwani di Bukittinggi, sewaktu aktif di Gerwani dulu ia harus bisa membagi waktunya antara pekerjaan rumah dan kegiatan organisasi. Biasanya sehabis masak pada sore hari mereka berkumpul untuk membicarakan tentang rencana kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan (wawancara, Nadiani, 06 Maret 2019).

Pada masa kejayaannya organisasi Gerwani mulai ikut dalam perpolitikan nasional. Pada akhir 1956, ditengah kian bergemanya tuntutan daerah, Gerwani tampil sebagai organisasi

perempuan paling keras yang menentang Dewan Benteng. Pilihan politik Gerwani untuk menentang Dewan Benteng tidak lepas dari pengaruh PKI yang kian mengakar dalam tubuh Gerwani. Selain itu perempuan Gerwani di Minangkabau juga bekerja sama dengan APRI dan PKI untuk menumpas PRRI. Sikap inilah yang kemudian mendatangkan pujian seperti yang dilansir oleh Harian Rakjat dan Api Kartini yang memberi sanjungan kepada Manismar, Nilawati, dan Nadiar yang tetap teguh melawan Dewan Benteng dan PRRI, meskipun mereka harus mempertaruhkan hidupnya. (Nuryanti,2011,hlm 71-73).

Kiprah dalam perpolitikan Gerwani terus berkembang, dengan massa yang semakin banyak dan sudah mempunyai cabang di berbagai kota di Indonesia, akan tetapi kejayaan itu akhirnya kandas pada tahun 1965 dengan ditandai meletusnya peristiwa G30S yang diduga Gerwani terlibat didalamnya.

3. Belitan Konflik G30S 1965

Peristiwa meletusnya Gerakan 30 September 1965 (G30S 1965) masih menjadi kontroversi sampai hari ini, sebab banyak versi yang menjelaskan siapa *dalang* dibalik peristiwa tersebut. Peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 orang Jenderal tersebut menjadi sejarah kelam dalam sejarah Indonesia. Salah satu diantara aset paling penting Angkatan Darat yang bisa digunakan untuk memberatkan tuduhnya terhadap PKI ialah kenyataan bahwa pembunuhan itu terjadi di Lubang Buaya, didekat Pangkalan Angkatan Udara Republik Indonesia, dimana pada hari itu tempat sukarelawan-sukarelawati Pemuda Rakyat dengan dibantu sejumlah anggota Gerwani menjalani latihan dalam rangka aksi ganyang Malaysia yang sedang menggelora.(Wieringa.1999.hlm30).

Adanya keterlibatan wanita dalam peristiwa pembunuhan tersebut dimuat dalam berbagai media massa seperti *Berita Yudha* dan *Angkatan Bersendjata*. Media tersebut menyebutkan bahwa Gerwani lah yang harus bertanggung jawab atas penyiksaan dan pembunuhan enam Jenderal tersebut. Gerwani dituduh bertelanjang dengan menari-nari “harum bunga” dan juga memotong alat vital para jenderal sebelum dimasukkan kedalam sumur di Lubang Buaya. Tuduhan tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani yang merupakan organisasi massa PKI yang menjadi *dalang* dalam pembunuhan tersebut.

Tuduhan tersebut sesungguhnya tidak terbukti, karena ahli forensik yang memeriksa mayat-mayat jenderal tidak mendapati bekas luka seperti yang dituduhkan. Akan tetapi, kombinasi propaganda media massa dan Angkatan Darat sangat berhasil mempengaruhi masyarakat, hal itu terbukti bahkan sampai saat ini propaganda dan kisah- kisah kekejian yang dituduhkan kepada Gerwani masih dipercaya luas di Indonesia.

Histeria dan kemarahan masyarakat menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan PKI dan organisasi massanya. Pemburuan dan penangkapan terhadap orang yang terlibat PKI dan organisasi massanya mulai gencar dilakukan. Pemburuan ini bukan terjadi di pulau Jawa saja, hal yang sama juga berdampak pada seluruh anggota PKI dan Gerwani di daerah tidak terkecuali di Sumatera Barat. Pembersihan orang-orang kiri dilakukan dengan membentuk Panitia Pengganyangan Gestapu, yang terdiri dari massa mantan anggota-anggota Masyumi, mantan anggota PRRI dan beberapa massa anti-PKI lainnya. (Sufyan,2014,hlm 10)

Tidak pandang apapun, massa dengan leluasa berlaku semena-mena terhadap anggota PKI dan ‘keluarganya’, di Sumatera Barat pemburuan dan penghancuran Gerwani dan PKI sama seperti di pulau Jawa. Mereka ditangkap bahkan ada yang langsung dibunuh ditempat tanpa tahu mereka bersalah atau tidak. Menurut data korban G30S 1965 di Sumatera Barat tercatat sekitar 2.277 orang dibunuh, dan 30.212 orang ditahan (sumber: YPKP 1965 Sumatera Barat).

Mereka yang selamat dari amukan massa segera diamankan di Polsek-polsek setempat. Mereka diinterogasi oleh polisi tentang keterkaitannya dengan peristiwa Gestapu tersebut. Seperti pengakuan Zulbainar seorang mantan bendahara umum Gerwani Kabupaten Padang Pariaman, dia bersama teman-teman Gerwaninya diamankan di Polsek Sungai Sariak untuk dimintai keterangan mengenai keterlibatan Gerwani dalam peristiwa Gestapu tersebut padahal ia sendiri tidak tau menau dengan kejadian tersebut. (wawancara, Zulbainar, 11 Agustus 2018)

Para perempuan-perempuan Gerwani pun akhirnya ditahan selama belasan tahun. Dipisahkan dari anak dan suami mereka, bahkan ada yang ditahan dalam kondisi tengah mengandung. Selama 12 tahun mereka merasakan kepedihan kehidupan di penjara, setiap hari hanya bisa berdoa agar masih bisa hidup besok hari, karena tidak ada yg menjamin keamanan mereka, sebab setiap malam hari salah seorang diruang tahanan akan di *bon* (hilang malam). (wawancara, Zulbainar, 11 Agustus 2018)

Pada tahun 1977, masa tahanan mereka pun berakhir. Tahun itu menjadi tahun bersejarah dalam hidup mereka. Seluruh tahanan Gerwani, PKI, BTI, dll dibebaskan dan dikembalikan ke masyarakat. Sesuai dengan keputusan pemerintah pusat pada saat itu. Mereka dikembalikan ke kampung halaman mereka masing-masing. Status baru sebagai *eks-tapol* menjadi suatu tantangan bagi mereka, karena stigma negatif masih berkembang dimasyarakat. Berbagai macam reaksi masyarakat dalam penerimaan mereka kembali ke kampung halamannya.

4. Pandangan Masyarakat terhadap Gerwani

Paska tragedi berdarah 1965 tersebut terjadi, kondisi politik Indonesia menyisakan trauma dan kepedihan yang mendalam terutama bagi anggota Gerwani maupun organisasi massa PKI lainnya yang juga ikut menjadi korban pada saat itu. Kebanyakan mereka hanya korban salah tangkap yang tidak tahu dengan pekar yang terjadi. Mereka mendapat getah dari kampanye fitnah yang dituduhkan kepada Gerwani. Pemburuan dan penangkapan yang dilakukan massa seperti yang mereka alami jauh dari kata manusiawi.

Dipenjarakan selama belasan tahun lamanya tidak dapat memperbaiki citra mereka di masyarakat. Dianggap sebagai musuh ideologi negara dan kaum agama karena menganut komunisme yang dianggap anti-tuhan sehingga mereka harus bertanggung jawab dengan hal-hal yang dituduhkan kepada mereka tersebut. Masa pembebasan bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Meski telah mendapat pembinaan untuk hidup bermasyarakat, mereka tetap mengalami ketersingkiran sosial, bahkan hal yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika mereka ditolak oleh keluarga mereka sendiri.

Bukan hanya masyarakat dan keluarga, Negara pun memberikan deskriminasi terhadap mereka, adanya ketentuan “Bersih diri, bersih lingkungan” mewajibkan para *eks-tapol* untuk melapor secara berkala kepada pihak berwajib setempat guna mencegah bangkitnya paham

komunisme kembali. Selain itu, para eks tahanan politik mendapat tanda khusus di KTP mereka agar mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan.

Ada beberapa pandangan masyarakat terhadap Gerwani maupun eks-tapol organisasi massa PKI lainnya. Sebagian masyarakat di Sumatera Barat ada yang memandang eks tapol sebagai orang keji, dan harus dihindari. Akan tetapi, ada juga sebagian masyarakat yang menganggap mereka tidak lagi berbahaya dan tidak harus dihindari. Ini lah salah satu khas orang Minangkabau yaitu sikap kekeluargaannya yang tinggi, setelah mereka dibebaskan mereka percaya bahwa bagaimana pun mereka adalah “orang kampung awak” sanak saudara, bagaimana pun harus diterima.(wawancara, Inyiah Muih, 11 Januari 2020).

Simpulan

Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal menempatkan perempuan pada kedudukan yang tinggi, sebutan *Bundo Kanduang* menjadi lambang sosok perempuan yang cerdas, arif, dan bijaksana. Perempuan Minangkabau mempunyai peran penting yang tidak bisa ditinggalkan, peran perempuan di Minangkabau tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga ikut berkontribusi dalam kemajuan nagari. Hal ini lah salah satu faktor pendukung berkembangnya organisasi-organisasi perempuan di Sumatera Barat salah satunya adalah Gerakan Wanita Indonesia. Meskipun mempunyai kedudukan yang tinggi dalam adat, perempuan Minangkabau harus paham dengan posisinya sebagai perempuan yang harus patuh pada laki-laki sesuai dengan ajaran Agama Islam. Pada sisi lain, perempuan Minangkabau juga merasa tersisihkan, beberapa fenomena dalam masyarakat membuat perempuan merasa sebagai korban, seperti poligami, kawin paksa, kawin dibawah umur, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung perempuan Minangkabau bergabung dalam Gerwani. Perjuangan perempuan Gerwani Minangkabau berakhir ketika meletusnya peristiwa G30S 1965.

Tuduhan dan propaganda atas keterlibatan Gerwani dalam upaya pembunuhan Jendral di Lubang Buaya ikut membelit perempuan Gerwani Minangkabau dalam konflik G30S 1965. Atas hal itu mereka diburu dan ditahan selama belasan tahun di penjara. Penderitaan berakhir pada tahun 1977, mereka dibebaskan dan dikembalikan ke masyarakat. Dibebaskan bukan lah akhir penderitaan, status baru sebagai eks-tapol menjadi tantangan baru bagi mereka, stigma negatif sebagai perempuan keji dan jahat mereka terima hingga hari ini.

Daftar Pustaka

- Fatimah, S. “Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek dan Ruang Lingkung Kajian”. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 2009 Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/274744425_GENDER_DALAM_KOMUNITAS_MASYARAKAT_MINANGKABAU_TEORI_PRAKTEK_dan_RUANG_LINGKUP_KAJIAN
- Lestariningsih, A. D. (2011). *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan*. Jakarta: Kompas.
- Nuryanti,R. (2011). *Perempuan berselimut konflik: Perempuan Minangkabau di masa Dewan Banteng dan PRRI*.Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sufyan, F. H. Palu Arit di Ladang Masyumi:Konstelasi politik di Nagari Kurai Taji Pariaman 1958-1966. *Jurnal Edukasi Vol.II. No.6 Juli 2014.*

https://www.academia.edu/20841264/PALU_ARIT_DI_LADANG_MASYUMI_KONSTELASI_POLITIK_DI_NAGARI_KURAI_TAJI_PARIAMAN_1958-1966

Wieringa,S. (1999). *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.

Wieringa, S. 1999.*Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia sesudah 1950*.(Jakarta: Kalyanamitra). https://www.academia.edu/9654687/Kuntilanak_Wangi

Zainuddin, M. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta:Ombak.

Wawancara dengan H.Alimunar (2018, 23 September)

Wawancara dengan Jami'an (2018, 18 September)

Wawancara dengan Janiar (2019, 23 Agustus)

Wawancara dengan Nadiani. (2019, 06 Maret)

Wawancara dengan Nadiani. (2018, 26 Juli)

Wawancara dengan Zulbainar. (2018, 11 Agustus)